

Penyelewengan Politik Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Rifa Shania Ramdhani¹, Hafidz Zachary²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: rifashani@upi.edu

Abstract

President Soeharto's government in Indonesia lasted for 32 years in office. One of the distinctive political characteristics of Soeharto's government was the spread of the corruption virus. Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) are deviant political practices and are considered unlawful acts. This article aims to find out the practices of corruption, collusion and nepotism that occurred during the reign of President Soeharto with the method used, namely the historical research method. The results of the research show that one of the corruption cases that occurred during Soeharto's reign was the case of embezzlement of funds from the Supersemar Scholarship Foundation which made Soeharto a suspect, apart from that there was a social gap between companies led by Suharto's cronies and companies led by ordinary people because of the existence of differences in the provision of facilities

Keywords: *Corruption, Collusion, Nepotism*

Abstrak

Pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia berlangsung selama 32 tahun masa jabatan, pemerintahan Soeharto mempunyai salah satu ciri politik yang khas yaitu meluasnya virus KKN. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan praktik politik yang menyimpang dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KKN yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto salah satunya yaitu kasus penggelapan dana Yayasan Beasiswa Supersemar yang menjadikan Soeharto sebagai tersangka, selain itu adanya kesenjangan sosial antara perusahaan yang dipimpin oleh kroni Soeharto dengan perusahaan yang di pimpin oleh masyarakat biasa karena adanya perbedaan dalam pemberian fasilitas.

Kata kunci: Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Soeharto

Copyright © 2024, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

Pendahuluan

Kasus Korupsi di Indonesia bukan sebuah pembicaraan baru lagi, praktik Korupsi, kolusi dan Nepotisme dianggap sebagai sebuah persoalan bangsa yang sulit untuk diberantas karena para pelaku korupsi merupakan golongan pejabat-pejabat besar. Indonesia menganggap kejahatan KKN sebagai kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* yang terjadi secara khusus, sehingga memerlukan penanganan dengan melakukan penegakan hukum secara khusus (Hadiati E, 2013). Secara historis praktik-praktik korupsi dapat meruntuhkan negara- negara yang paling perkasa sekaligus, seperti yang dipaparkan oleh Edward Gibbon dalam bukunya yang Monumental *The History Of The Decline And Fall Of The Roma Empire* memaparkan bahwa keruntuhan imperium kerajaan Romawi karena merajalelanya praktik korupsi (Alkostar, 2008).

Praktik-praktik korupsi di Indonesia jika dilihat secara historis, praktik korupsi telah terjadi mulai dari zaman kerajaan-kerajaan. Pada zaman kerajaan sistem pemerintahan menggunakan system monarki, dalam sistem monarki jawa dikenal konsep memberi untuk

mendapat perlindungan baik tu perlindungan keselamatan hidup ataupun jabatan (Hilman, 2018). Pada zaman kerajaan ini banyak masyarakat yang merasa resah akan keselamatan hidup mereka, oleh karena itu masyarakat harus memberikan imbalan kepada pejabat kerajaan baik itu berupa emas maupun hasil bumi yang biasa mereka sebut dengan upeti. Praktik upeti ini biasanya dilakukan oleh para pejabat kerajaan yang posisinya lebih rendah dari raja untuk melindungi jabatan mereka, praktik ini biasanya dilakukan oleh seorang bupati atau adipati kepada raja ataupun seorang wedono kepada bupati, dan apabila mereka tidak memberi upeti kepada raja hal ini dianggap sebagai pembangkangan (Syam, 2007). Praktik-praktik korupsi ini masih terus terjadi di Indonesia mulai dari zaman kerajaan, zaman colonial, zaman orde lama, zaman orde baru hingga saat ini, praktik korupsi mulai sangat merajalela dan dikenal masyarakat Indonesia pada zaman orde baru atau pada pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru terjadi kehancuran ekonomi, sosial dan politik. Presiden Soeharto yang menjabat pada masa pemerintahan orde baru berupaya untuk membenahi masalah-masalah tersebut dan menstabilkan kembali keadaan ekonomi dan politik dengan melibatkan kaum teknokrat dan ABRI dalam sistem pemerintahan (adam, 2009). Presiden soeharto mempercayakan pembangunan ekonomi kepada kaum tektorat dan penataan serta penertiban politik diserahkan kepada militer atau ABRI. Keberhasilan Presiden Soeharto dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan negara bisa kita beri apresiasi, meskipun untuk mencapai keberhasilan tersebut banyak penyimpangan-penyimpangan politik yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Penyimpangan-penyimpangan ini mulai terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini bermula dari Thailand tahun 1997, sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah, Indonesia mencoba untuk menstabilkan ekonomi dengan melakukan rekonstruksi ekonomi dengan melakukan banyak alternatif-alternatif untuk menstabilkan ekonomi, namun usaha yang dilakukan hanyalah sia-sia (Luhulima, 2006). Karena adanya krisis ekonomi ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto mulai menurun, perekonomian yang dibangun selama 32 tahun mulai hancur dan ditambah dengan harga-harga yang mulai naik, mulai dari bahan-bahan pokok sampai bahan-bahan kebutuhan lainnya, serta adanya hubungan-hubungan kerja diputus sehingga menyebabkan angka pengangguran meningkat. Selain itu hal yang paling dikenal pada masa pemerintahan Soeharto yaitu maraknya virus KKN di Indonesia.

Praktik KKN mulai dikenal dikalangan masyarakat ketika masa pemerintahan presiden Soeharto, praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme mengakar pada tubuh birokrasi pemerintahan presiden Soeharto dan Praktik KKN menjadi ciri khas politik presiden Soeharto. Praktik KKN di Indonesia masih terus terjadi, lalu kasus KKN apa saja yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto? dan praktik KKN apa saja yang terjadi di masa kini? hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui kasus-kasus KKN yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan praktik KKN yang terjadi di masa kini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengungkap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian Sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuan

dilakukan penelitian ini adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif (Lubis, 2008). Seperti yang disampaikan oleh Louis Gottschalk tahapan dari penelitian sejarah ini, yakni: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi (Gottschalk, 1986).

Tahap pertama yaitu Heuristik, Heuristik adalah tahap dimana penulis mulai mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, informasi dan jejak masa lampau serta data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahap ini merupakan tahap yang penting, tahap dimana penulis mencari sumber-sumber yang mendukung untuk penelitian ini baik itu sumber primer maupun sekunder. Penulis mengumpulkan sumber yang terkait dengan Praktik KKN pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Tahap kedua yaitu Kritik Sumber, sumber yang telah ditemukan melalui tahapan heuristik akan diuji terlebih dahulu, pengujian ini dilakukan melalui kritik. Kritik sumber yaitu tahapan atau kegiatan meneliti sumber, informasi, jejak tersebut secara kritis, yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal (Lubis, 2008). Pada tahap ini penulis melakukan kritik atau keabsahan sumber atas sumber-sumber yang telah terkumpul dan mulai mencari bagian-bagian yang berkaitan dengan permasalahan.

Tahap ketiga yaitu Interpretasi atau penafsiran yang merupakan tahapan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling berhubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Pada tahap ini penulis mulai menafsirkan data-data yang telah terkumpul dan telah tersusun sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah yang akurat mengenai Praktik KKN Pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto.

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Pada tahap ini dijelaskan tahapan-tahapan penelitian sehingga dapat tersusun secara sistematis hasil penelitian ini yaitu Praktik KKN yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto ini disajikan dalam bentuk deskriptif-analisis dan disusun secara sistematis serta logis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian KKN: Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Korupsi adalah tindak kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa, korupsi merupakan Tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dampak dari korupsi tersebut juga sangat besar dan bersifat paralel serta merusak seluruh sistem kehidupan yaitu, sistem kehidupan dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dari aspek ekonomi, korupsi dapat menyebabkan kerugian Negara yang sangat besar sehingga dapat mengganggu perekonomian Negara serta dapat menyebabkan kesenjangan yang tinggi antar masyarakat (Junaidi, 2017). Para pejabat-pejabat negara menjadikan kesempatan jabatannya untuk memperkaya diri, jabatan ini disalah gunakan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Mereka memperkaya diri mereka dengan menggunakan uang negeri untuk kepentingan Pribadi.

Tindak penyelewengan dalam politik yang dilakukan oleh pejabat tidak hanya dalam memperkaya diri dengan mengambil keuntungan dari negara, tetapi banyak juga pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan Kerjasama rahasia di belakang layar dengan maksud yang tidak terpuji atau melakukan persekongkolan untuk kepentingan pribadi, praktik tersebut bisa disebut dengan praktik Kolusi.

Kolusi adalah permufakatan yang dilakukan seseorang atau golongan yang sifatnya

melawan hukum, merugikan orang negara, merugikan pihak-pihak lain (Rafi, 2006). Kolusi ini merupakan bentuk persekongkolan atau Kerjasama yang dilakukan seseorang secara rahasia untuk mendapat keuntungan pribadi dan dilakukan karena ada kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Ismansyah, 2010). Maka dari itu nepotisme merupakan kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, teruma dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah, nepotisme ini biasanya terjadi dalam instansi pemerintahan atau perusahaan dimana mereka lebih mengutamakan keluarga, teman dan saudara tanpa melihat kemampuannya terlebih dahulu.

Praktik-praktik korupsi ini masih kerap terjadi di Indonesia baik itu korupsi dengan penggelapan harta negara untuk memperkaya diri, korupsi dengan melakukan suap atau Kerjasama rahasia yang sifatnya merugikan negara dan korupsi yang sifatnya mengutamakan sanak saudara tanpa mempertimbangkan kemampuannya.

Praktik KKN yang Terjadi Pada Masa Pemerintahan Soeharto

Pemerintahan Presiden Soeharto dimulai tahun 1967, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dikenal dengan masa orde baru yang berlangsung selama 32 tahun masa jabatan. Pemerintahan soeharto mewarisi krisis ekonomi, politik dan sosial sehingga presiden soeharto harus mengambil langkah agar bisa mengatasi permasalahan tersebut (Aprilia, 2014). Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi oleh pemerintahan presiden soeharto, pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan menjadi tolak ukur keberhasilan Soeharto, meskipun begitu presiden soeharto mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia serta banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya yang membuat masyarakat kecewa dan resah. KKN adalah salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan presiden soeharto, selama 32 tahun menjabat banyak praktek KKN yang terjadi dalam tubuh birokrasi orde baru salah satu kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang pernah terjadi pada masa orde baru yaitu:

A. Korupsi

Kasus korupsi pernah terjadi pada masa pemerintahan presiden Soeharto dan yang menjadi tersangka dalam kasus ini yaitu Presiden Soeharto yang terlibat dalam kasus penggelapan dana 7 yayasan pimpinan Soeharto yaitu kasus beasiswa Yayasan Supersemar. Pada masa pemerintahan Soeharto sekiranya ada 7 yayasan yang dipimpin oleh Soeharto yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Trikora. Pada tahun 1976 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1976 yang berisi tentang Himbauan bagi para pengusaha untuk menyumbang sekitar 5% dari keuntungannya untuk Yayasan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan sosial (Keppres No.15 Tahun 1976)

Yayasan Beasiswa Supersemar (YBS) adalah sebuah Yayasan yang didirikan oleh Soeharto dan diketuai oleh Soeharto. Berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 1976, YBS menerima 5% laba bersih dari bank milik pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia (Tambok, 2010). Pengambilan 5% dari laba bersih bank milik

pemerintah akan ditujukan untuk biaya beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu, ada sekitar US \$420 Juta dollar AS atau Rp.185 Miliar dana yang diterima oleh Yayasan Supersemar yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan sosial dan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu. Dana yang diterima oleh YBS tidak digunakan sebagaimana mestinya, dana itu disalahgunakan oleh Soeharto sehingga banyak siswa dan mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kesulitan dalam pembiayaan, karena mereka tidak mendapat bantuan biaya pendidikan.

Kasus Korupsi Presiden Soeharto menurut Transparency International, presiden soeharto menjadi pemimpin negara yang melakukan korupsi terbesar dibandingkan dengan pemimpin negara-negara lainnya, selama 32 tahun menjabat soeharto diduga sudah menggelapkan dana sekitar 15-35 Milliar dollar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.

B. Kolusi

Praktik Kolusi pada pemerintahan Soeharto masih berhubungan dengan praktik korupsi terkait Yayasan beasiswa Supersemar, Presiden Soeharto yang seharusnya mendapat hukuman karena kasus ini berujung pembebasan dari tanggung jawab berdasarkan keputusan persidangan (Qonita,). Persidangan kasus korupsi yang melibat Soeharto berujung dengan pembebasan dan dinyatakan tidak bersalah, menurut keputusan mahkamah agung RI Nomor 601 K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977 menyebutkan bahwa gugatan penggugat tidak diterima karena tujuan gugatan tersebut ditujukan kepada pribadi (Soeharto), seharusnya gugatan tersebut dilayangkan kepada pengurus Yayasan, karena segala bentuk kegiatan Yayasan tersebut telah disetujui oleh berbagai pihak (Tambok, 2010). Berdasarkan hasil persidangan tersebut Soeharto dibebaskan dari tanggung jawab dan dinyatakan tidak bersalah, kegagalan dalam mengadili Soeharto diduga telah diskenariokan dan kejaksan dianggap tidak bersungguh-sungguh menuntaskan kasus tersebut bahkan tidak bisa menghadirkan secara paksa Soeharto dalam persidangan. Kasus penggelapan ini hingga saat ini masih belum menemukan titik temu dan masih dalam proses penyelesaian antara negara dengan keluarga Soeharto.

C. Nepotisme

Pemerintahan Soeharto selama 32 tahun ini dimanfaatkan sangat baik oleh Soeharto dengan memanfaatkan hasil-hasil pertumbuhan dan pembangauna (Sahdan, 2004). Dalam pemerintahannya Soeharto menggunakan konsep “kekeluargaan yang harmonis” dalam artian Soeharto memanfaatkan Pancasila untuk kepentingan pribadinya dan memperlancar bisnis milik keluarga serta kroninya (winters, 1999). Soeharto memperkaya dirinya dengan melibatkan keluarganya dalam pemerintahan dan banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang juga milik keluarga Soeharto.

Banyaknya lembaga dan perusahaan negara yang dipimpin serta dimiliki oleh kroni dan keluarga Soeharto menambah tingkat kesenjangan sosial semakin meningkat dalam masyarakat. Kesenjangan ini terjadi karena fasilitas yang diberikan pemerintah kepada perusahaan rakyat biasa tidak sama dengan fasilitas yang diberikan kepada kroni dan keluarganya sehingga menyebabkan kecemburuan sosial (urbaningrum, 1999). Perbedaan ini yang membuat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Soeharto

yang terlalu mementingkan kroninya dibandingkan rakyat Indonesia yang lain. Pada masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan istilah Soeharto yang mengurus negara dan Ibu Tien yang mengurus kelancaran bisnis negara. Ibu Tien mengurus keterlibatan berbagai perusahaan negara, perusahaan militer dan perusahaan keluarga Soeharto yang menyebabkan seluruh sektor ekonomi negara dan swasta di Indonesia dapat diatur dengan baik. Keretakan bisnis tersebut mulai terlihat ketika Ibu Tien sudah meninggal.

Praktik KKN Masa Kini

Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia masih terus terjadi hingga masa kini, mulai dari zaman kerajaan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi praktik-praktik KKN masih terjadi. Praktik ini mulai merambat ke berbagai bidang, tidak hanya dalam lingkup politik saja, namun praktik KKN ini merambat ke sektor terendah dari bagian politik, pendidikan hingga Kesehatan. Para pejabat-pejabat masa kini banyak yang melakukan korupsi tidak hanya pejabat pemerintah pusat tetapi pejabat pemerintah daerah pun tidak lepas dari Tindakan korupsi,

Salah satu kasus korupsi saat ini Tahun 2020-2021 ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19 dan paling banyak menyunat Dana Bansos (iNews). Seperti kasus Julian Batubara yang merupakan mantan Menteri Sosial yang menyunat anggaran Bansos, dengan memotong anggaran paket sembako sebesar 10rb dari setiap paket sembako. Jumlah total dana yang di korupsi oleh Julian Batubara sekitar 5,9 Triliun. Selain kasus korupsi ada juga kasus suap yang dilakukan oleh mantan walikota Tasikmalaya yaitu Budi Budiman yang menyuap Lembaga dalam urusan anggaran dana alokasi khusus agar cepat diberikan kepada pemerintah daerah. Kasus lain yang mulai merambat ke dunia Pendidikan yaitu kasus Nepotisme, kasus nepotisme ini sudah merambat ke berbagai sektor. Orang-orang yang mempunyai kerabat dalam suatu lembaga mendapat akses yang mudah untuk ikut serta dalam lembaga tersebut baik itu dalam pekerjaan ataupun seleksi untuk masuk perlombaan atau instansi.

Kesimpulan

Praktik KKN merupakan bukan praktik yang asing lagi yang sering terjadi di Indonesia, praktik-praktik ini sudah sering terjadi mulai dari zaman kerajaan hingga sampai saat ini. KKN mulai muncul kembali dan kenal masyarakat ketika masa Pemerintahan Presiden Soeharto. KKN menjadi ciri khas dalam pemerintahan Presiden Soeharto, bahkan KKN menjadi salah satu faktor berakhirnya pemerintahan Soeharto.

Banyak kasus KKN yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto diantaranya kasus penggelapan dana beasiswa Yayasan Beasiswa Supersemar yang menetapkan Presiden Soeharto sebagai tersangka, namun dalam persidangan kasus ini presiden Soeharto dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung, hal ini diduga telah ada Kerjasama rahasia antara Presiden Soeharto dengan jaksa penuntut umum. Selain itu ada kasus Nepotisme yang sangat melekat dalam tubuh birokrasi orde baru, dimana presiden Soeharto lebih mengutamakan keluarga dan kroninya dalam urusan pemerintahan dan urusan bisnis yang dipegang oleh keluarga Soeharto.

Referensi

- Adam, Asvi W. (2009). *Membongkar Manipulasi Sejarah; Membongkar Pelaku dan Peristiwa*. Jakarta: Kompas
- Alkostar, A. (2008). Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen. *Hukum*, 1-13.
- Aprilia, Eka L. (2014). Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998. *Jurnal Universitas Jember*
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gottschalk, Louis.(1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Hadiati, E, I. (2013). Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor. *Al-Ulum*, 345-372.
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 1*
- Junaidi, I Ketut Patra 1. Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1)
- Luhulima, James. (2006). *Hari-hari Terpanjang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*. Jakarta: Kompas.
- Lubis, Nina H. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: YMSI
- Mac Iver, R. M. & Charles H. 1961. *Society An Introducing Analysis*. London : Macmillan & co ltd
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1976 Tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara
- Qonita, Ana. (2010). Pandangan alquran terhadap praktek kolusi dan Nepotisme. Skripsi: IAIN Semarang.
- Rafi, Abdul, A.F. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Republik
- Syam, Nur. (2007). Indonesia di Tengah Problem Keterpurukan: Memotong Tradisi Korupsi. *Forum Seminar di Universitas Bhayangkara Surabaya. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Sahdan, G. (2004). *Jalan Transisi Demokrasi*. Bantul: Pondok Edukasi
- Tambok, Nainggolan. 2010. Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar. Tesis: Universitas Sumatera Utara Medan
- Urbaningrum. A. (1999). *Kisah Perjuangan Reformasi "Potret Konflik Pasca Kejatuhan Soeharto"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Winters, J.A. (1999). *Dosa-dosa politik Orde Baru*. Jakarta: Djambatan
- Yusuf, A. Hilman. (2018). *Upeti Sebagai Bentuk Hegemoni*. Ponorogo: Cv. Calina Media